

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan akan berfungsi maksimal jika ditampilkan sesuai dengan unsur-unsur kualitatifnya, yaitu : mudah dipahami, andal, dapat dibandingkan (*comparable*), dan relevan. Laporan keuangan ditampilkan kepada para pemegang kepentingan (*stakeholder*) yaitu : pihak manajemen, karyawan, investor (*holder*), kreditor, supplier, pelanggan, maupun pemerintah.

Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013) disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan ekonomi laporan keuangan dipengaruhi banyak faktor, antara lain : keadaan perekonomian, politik dan prospek industri.

Laporan keuangan menampilkan informasi lebih dari sekedar angka, karena mencakup informasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan ini berfungsi untuk pengambilan keputusan perusahaan maupun ekonomi untuk kepentingan

bisnis. Misalnya, investor dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk kegiatan pembelian atau penjualan saham perusahaan.

Pada saat perusahaan menerbitkan laporan keuangan, sesungguhnya perusahaan tersebut ingin menunjukkan kondisinya dalam keadaan yang terbaik. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan pada laporan keuangan yang akan menyesatkan investor dan pengguna laporan keuangan yang lain. Ketika ada salah saji dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak valid untuk dipakai sebagai sumber pengambilan keputusan, karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Meningkatnya berbagai skandal akuntansi di dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Stice, Earl, James, dan Skousen, 2009).

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2000), kecurangan/*fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas. Definisi *fraud* menurut Tuanakotta (2013:28) ialah: "*Any unlawful demonstration described by trickery, camouflage or infringement of trust. these demonstrations are not subject to the utilization of dangers of savagery or actual power. Extortion are*

*executed by people, and association to get cash, property or administration; to stay away from installment or loss of administrations; or to get individual o business advantage."*

Definisi *fraud* menurut Johnstone, (2014:34) ialah: "*Fraud is an intentional act involving the use of deception that results in a material misstatement of the financial statements.*"

Definisi *fraud* menurut Arens (2012:336) ialah: "*Extortion is characterized as a purposeful misquote of budget summaries.*"

Definisi *fraud* menurut Karyono (2013:4-5) ialah: Kekeliruan dapat disebut sebagai pemerasan yang mengandung pentingnya penyimpangan dan demonstrasi yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang tidak wajar (menipu) kepada berbagai perkumpulan, yang dilakukan oleh orang-orang hebat. " Beberapa pengertian otoritas pungli dalam hal ini setuju, pencipta menyimpulkan bahwa pemerasan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dengan tujuan untuk menguasai, menyelundupkan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, di mana kegiatan tersebut dapat merugikan perkumpulan yang bersangkutan. Selain itu, pemerasan dalam ringkasan anggaran dapat membuat data yang dimasukkan dalam laporan fiskal tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, sehingga data dapat membuat klien laporan anggaran memutuskan pilihan yang tidak wajar dan mengalami kerugian besar.

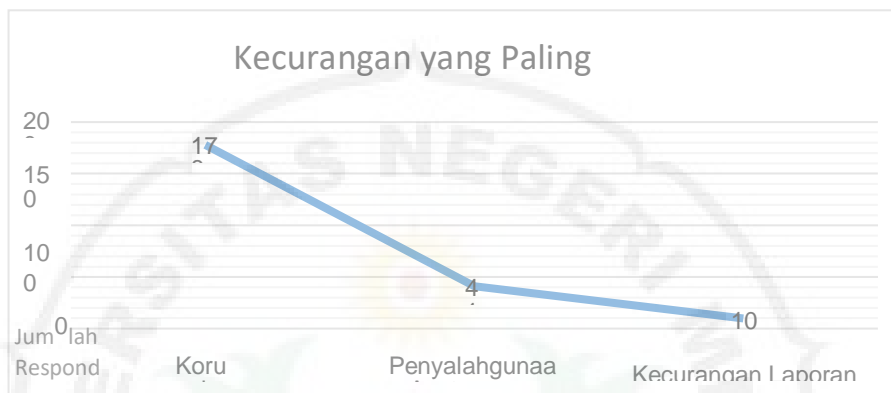
Skandal pembukuan telah berkembang secara umum, mirip dengan kasus di AS. Spathis (2002) mengklarifikasi bahwa di AS, pemerasan pembukuan yang terjadi pada Enron menyebabkan kemalangan besar di hampir semua bisnis. Kemarahan pembukuan dinilai telah merugikan Enron US\$50 miliar, selain US\$32 miliar kemalangan pendukung keuangan dan banyak pekerja Enron harus kehilangan aset anuitas mereka sekitar US\$1 miliar (Tiffani dan Marfuah, 2015).

Indonesia sebagai negara dengan kondisi moneter yang goyah dan lebih jauh lagi kasus kebiadaban pembukuan yang tak terhindarkan. Pada tahun 2001, terjadi kemelut moneter oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). PT Kimia Farma adalah sebuah organisasi milik negara yang penawarannya telah dipertukarkan pada perdagangan saham dengan tujuan menjadi sebuah organisasi bidang moneter. Berdasarkan tanda-tanda dari Badan Usaha Milik Negara dan penilaian oleh (BAPEPAM 2002) ditemukan adanya kesalahan kutipan dalam ikhtisar fiskal yang menyebabkan kelebihan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp. 32,7 miliar, yang merupakan 2,3% dari kesepakatan. selanjutnya, 24,7% dari total kompensasi. Kesalahan ini terjadi dengan melebih-lebihkan penawaran dan persediaan di unit khusus, dan dilengkapi dengan pembengkakan biaya persediaan yang telah disetujui oleh kepala bagian produksi untuk

memutuskan nilai persediaan di unit khusus yang dilakukan pada unit yang tidak diperiksa oleh evaluator luar (Koroy 2008). ).

Selain kasus kecurangan laporan keuangan juga terjadi pada perusahaan yang bergerak dibidang *property, real estate* dan pembangunan. Salah satunya yaitu perusahaan BUMN Waskita Karya, ketika kasus ini terungkap ketika catatan moneter dievaluasi kembali untuk mendirikan organisasi untuk penjualan saham pertama (Initial Public Offering). Sebelumnya Pengawas Keuangan PT. Adhi Karya (Persero), M. Choliq yang merupakan Pengawas Utama Waskita Karya, yang hingga saat ini menemukan limpahan Rp. 400 miliar dan dikaitkan bahwa kepala suku dengan periode lalu merancang perincian moneter dari tahun 2004 hingga 2008 dengan mengingat pendapatan proyek jangka panjang yang diproyeksikan untuk masa depan sebagai pendapatan untuk tahun tertentu (Putra, 2009).

Berdasarkan survai *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia pada tahun 2016, kecurangan yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi yaitu 178 responden, lalu *asset misappropriation* sebanyak 41 responden, dan kecurangan laporan keuangan menjadi jenis kecurangan terbanyak ketiga yang dipilih yaitu 10 responden. Grafik kecurangan yang paling merugikan di Indonesia dirangkum dalam grafik 1.1.



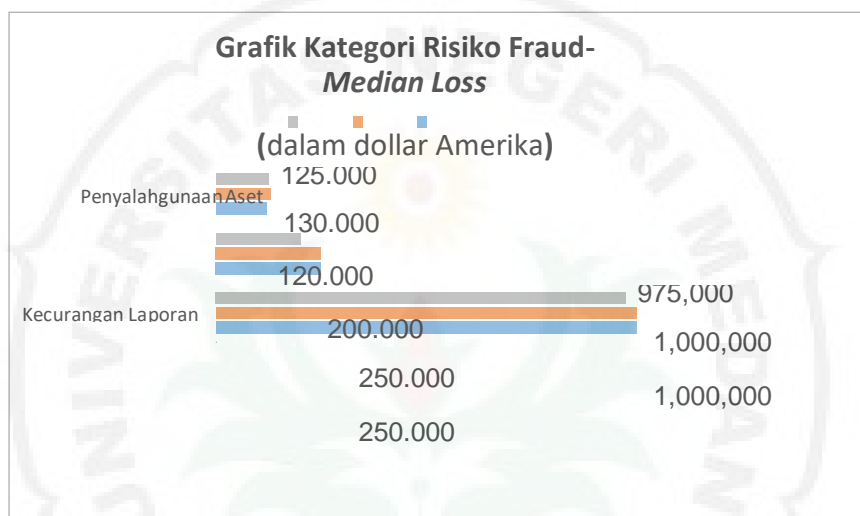
Grafik 1.1

Grafik Kecurangan yang Paling Merugikan

Sumber: ACFE-Indonesia 2016

Meskipun jumlah kasus kecurangan laporan keuangan yang paling sedikit, namun menurut ACFE Indonesia kecurangan laporan keuangan yang paling merugikan. Perbedaan ini diduga karena di Indonesia berbagai kejahatan yang berasal dari kejahatan laporan keuangan belum banyak terungkap, seperti kejahatan penipuan informasi di bursa efek, serta kejahatan karena penipuan informasi pajak. Perbedaan ini juga terjadi karena perbedaan pengalaman responden dalam menjawab pertanyaan indikator survei. Berdasarkan *report to the nation* yang dilakukan ACFE, jenis kecurangan dengan *median loss* yang paling besar adalah kecurangan laporan keuangan dengan *median loss* \$975.000, kemudian diikuti berturut-turut untuk posisi kedua dan ketiga, yaitu korupsi sebesar \$200.000 dan

penyalahgunaan aset sebesar \$125.000. Grafik kategori risiko fraud-*median loss* dapat dilihat pada grafik 1.2.



Grafik 1.2

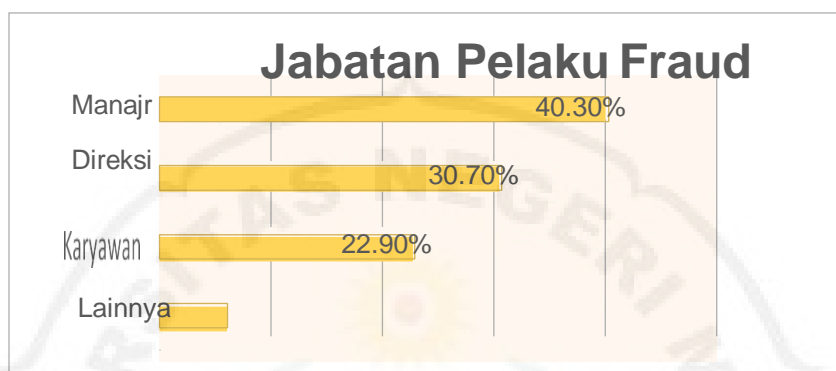
Grafik Kategori Risiko Fraud-*Median Loss* Sumber: ACFE 2016

Melihat kenyataan saat ini di atas, misrepresentasi laporan fiskal adalah semacam pemerasan yang menghambat organisasi, karena itu termasuk kerugian yang sangat besar bagi organisasi. Hal ini perlu pertimbangan yang sungguh-sungguh, karena banyak kecurangan ringkasan fiskal yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki kemampuan, sehingga kasus ini lebih sulit untuk diungkap. Banyak individu yang mengaitkan misrepresentasi dengan pelanggaran kelas menengah, karena pemerasan dan pelanggaran kelas menengah diselesaikan dengan cara mengajar, menghargai individu, dan memiliki kedudukan

(Priantara, 2013). Situasi atau kapasitas individu dalam organisasi mungkin memberikan kemampuan beradaptasi kepada seseorang untuk memanfaatkan peluang pemerasan secara maksimal, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Banyaknya pengguna laporan keuangan dan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh salah saji laporan keuangan, tentu saja perusahaan harus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka hasilkan. Prasyarat untuk laporan anggaran yang baik adalah ringkasan fiskal yang dibebaskan dari semua kesalahan material yang dapat menipu klien laporan anggaran. Dilacak juga bahwa inspirasi para pelaku untuk melakukan pemerasan adalah keinginan untuk bertindak dalam gaya hidup tontonan dan hanya khawatir tentang keuntungan, sehingga mereka terpaksa mengambil uang organisasi untuk mengatasi masalah mereka (ACFE Indonesia, 2016). ACFE Indonesia juga menemukan bahwa 40,3% kecurangan dilakukan oleh manajer, lalu 30,7% oleh direksi atau pemilik, serta 22,9% oleh karyawan dan lainnya sebesar 6,1%. Grafik kecurangan berdasarkan jabatan atau posisi pelaku dirangkum dalam grafik 1.3.





Grafik 1.3

Grafik Pelaku Kecurangan Laporan Keuangan berdasarkan Jabatan

Sumber: ACFE-Indonesia 2016

Kasus kecurangan laporan keuangan yang banyak merugikan pengguna laporan keuangan dan skandal terbesar yang ada didunia adalah adalah kasus Enron dan kasus Worldcom. Perusahaan Enron mengajukan representasi yang keliru dengan membantu keuntungan dan menyembunyikan lebih dari \$1 miliar yang membayar debitor dengan mengambil keuntungan dari organisasi di bawah meja, dan mengendalikan pasar tenaga dan energi di Texas dan California. Hasil dari rasa malu tersebut ditunjukkan oleh kekurangan kapitalisasi pasar sebesar \$70 miliar yang melenyapkan banyak pendukung keuangan, perwakilan, dan pensiunan (Efitasari, 2013).

Kemarahan ringkasan anggaran yang keliru juga terjadi di WorldCom, organisasi komunikasi siaran terbesar kedua di AS. WorldCom menyampaikan representasi yang keliru dengan

mengendalikan pembukuan dengan membengkakkan keuntungan sekitar USD 3.850.000 yang dibuat oleh para pemimpin organisasi. Rasa malu pembukuan organisasi membuat pertukaran bagiannya berhenti pada perdagangan Hubungan Masyarakat Perlindungan Penjual Robotized Citations (NASDAQ), yang setengah bulan setelah fakta WorldCom keluar dari semua kewajiban keuangan. Pameran organisasi itu memalsukan miliaran bisnis rutin sebagai penggunaan modal yang dilebih-lebihkan pada pertengahan 2002 memberikan keuntungan sebesar \$11 miliar. Bernard Ebbers sebagai CEO (Presiden) WorldCom juga meminjamkan perusahaannya lebih dari \$400 juta untuk menutupi kerugian perdagangannya sendiri. Bernard Ebbers telah menyampaikan laporan palsu, intrik dan fiskal yang salah, namun Kepala WorldCom sebelumnya berpendapat tidak bertanggung jawab (Sihombing, 2014).

Saat ini, bidang properti dan tanah perlu dipertimbangkan karena dari tahun 2001-2014 ada 35 organisasi yang terbukti telah mengajukan pungutan liar dan salah satunya dari bidang properti dan tanah. Hal ini karena semakin banyaknya desainer bisnis yang merakit berbagai jenis penginapan seperti penginapan, kawasan kondominium, dll. Peningkatan suatu kawasan, seperti properti dan lahan, membuka peluang pemerasan. Menurut Sudaryatmo selaku pelaksana Indonesian Shoppers Establishment, telah terjadi perluasan keberatan perkara yang sah di bidang properti oleh nasabah kepada Indonesia

Buyers Establishment dan perkara di kawasan ini telah menempati urutan kedua setelah moneter dan perbankan (Tribun Timur, 2015).

Berdasarkan informasi dari Indonesian Buyers Establishment, ada 157 kali keluhan area properti yang ditujukan kepada sekitar 100 desainer. Dari kasus all out tersebut terdapat 17 macam keluhan, antara lain teknisi melanggar jaminan, keterlambatan penyerahan unit bangunan, keterlambatan pemberian over endorsement, diskon yang tidak segera diselesaikan, aksesibilitas kantor khusus dan umum, kontras dalam kualitas, penentuan, dan rencana format bangunan, pengaturan otoritatif. kesepakatan dan pembelian, akta penawaran dan pembelian dan kebebasan membangun, biaya administrasi alami, penjadwalan ulang bagian, tanah properti yang dipertanyakan tersedia untuk dibeli, kontras dalam kontras wilayah bangunan, promosi pamflet yang tidak pantas, pendaftaran Hubungan Pemilik dan Penghuni Pads, bantuan yang tidak dapat diterima, dan keberatan yang berbeda. Perluasan kasus di daerah ini sebesar 12,7% dari tahun 2013 yang hanya 121 kasus, menunjukkan perlunya pengawasan terhadap potensi misrepresentasi ringkasan fiskal di daerah ini (kompas.com, 2015).

Pengakuan atas kesalahan penyajian ringkasan fiskal tidak selalu mendapat tempat yang cemerlang mengingat berbagai inspirasi fundamental dan berbagai strategi untuk mengarahkan

pemerasan laporan anggaran (Brennan dan McGrath, 2007). Administrasi perusahaan sering dikaitkan dengan perincian uang palsu. Pernyataan ini ditegaskan oleh eksplorasi Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) yang mengamati bahwa frekuensi misrepresentasi yang paling penting terjadi pada organisasi dengan administrasi perusahaan yang lemah, misalnya, organisasi yang lebih dibanjiri oleh orang dalam dan cenderung tidak memiliki papan ulasan. Penemuan Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) dibangun oleh Dunn (2004) yang beralasan bahwa misrepresentasi pasti terjadi ketika ada pengelompokan kekuatan yang dimiliki oleh orang dalam.

Untuk memberikan jawaban atas kekurangan dalam strategi pengenalan misrepresentasi di planet ini, American Foundation Affirmed Public Bookkeeper (AICPA 2002) memberikan Articulation of Evaluating Principles No. 99 (SAS No. 99) sehubungan dengan Pemikiran Kesalahpahaman dalam Tinjauan Laporan Fiskal di Oktober 2002. Alasan pemberian SAS No. 99 adalah untuk membangun kecukupan pemeriksa dalam mengenali pemerasan dengan mengevaluasi faktor risiko kesalahan penyajian organisasi. Faktor risiko misrepresentasi yang diambil dalam SAS No. 99 bergantung pada hipotesis faktor risiko pemerasan (Cressey, 1953).

Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis Wolfe dan Hemerson (2004), ada empat keadaan yang umumnya hadir

dalam demonstrasi palsu, yaitu dorongan/tekanan, peluang, pertahanan, dan kapasitas yang dikenal sebagai batu permata misrepresentasi. Keempat keadaan tersebut merupakan faktor risiko berkembangnya pungli di berbagai keadaan. Bagian batu mulia yang keliru tidak dapat dikonsentrasikan secara langsung, jadi analisis harus mendorong faktor dan perantara untuk mengukurnya (Skousen et al., 2009). Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) *Auditor Switching* sebagai variabel *intervening*, 2) *Audit Delay*, 3) Kualitas Audit, 4) *Leverage* sebagai variabel independen.

Pertama-tama, *Auditor switching*. Menurut pendapat Pawitri dan Yadnyana (2015:2302-8578), *Auditor switching* merupakan perbedaan dalam jabatan publik (KAP) serta perbedaan pemeriksa yang diselesaikan oleh suatu organisasi. Pertukaran evaluator muncul karena giliran tinjauan wajib. Perubahan penguji dilakukan untuk mengikuti derajat otonomi dan objektivitas yang dilakukan oleh penguji. Pengertian Pertukaran Pemeriksa sebagaimana dikemukakan oleh Mardiyah (2002), secara khusus: Pertukaran pemeriksa adalah suatu tindakan KAP yang dilakukan oleh organisasi. Variabel yang membuat pelatihan ini terjadi dapat muncul dari klien atau reviewer itu sendiri. Dua faktor yang mempengaruhi organisasi untuk mengubah KAP adalah faktor terkait klien, khususnya: tantangan moneter, administrasi yang dibom, perubahan kepemilikan, Penjualan saham pertama (penawaran umum

perdana) dan faktor terkait pemeriksa, khususnya: biaya peninjauan dan kualitas ulasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Febrianto (2009), perbedaan pemeriksa terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sengaja, keduanya dapat diketahui dari penekanan pertimbangan pada masalah. Jika perbedaan dalam pemeriksa disengaja, perhatian mendasar ada di sisi klien. Kemudian lagi, jika perbedaan inspektur terjadi pada premis wajib, pertimbangan utama akan pergi ke evaluator. Seperti yang ditunjukkan oleh Nasser et al (2006:4) dalam Nabila (2011), kehadiran giliran inspektur menyebabkan residensi review yang lebih terbatas dan organisasi akan mengubah evaluator. Ketika pengulas mengakui komitmen, penguji memiliki kewajiban profesional untuk masyarakat umum, individu yang berbeda dari pemegang buku publik dan klien. Oleh karena itu, pilihan untuk mengakui klien audit lain atau melanjutkan hubungan klien saat ini tidak boleh dikacaukan. Pembetulan pergantian auditor terjadi karena keterbatasan komitmen audit seperti yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, pergantian auditor terjadi karena konflik pada latihan pembukuan tertentu sehingga klien akan pindah ke auditor yang sependapat dengan klien.

Hubungan *auditor switching* dengan pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan adalah dengan adanya *auditor switching* secara sukarela bisa menjadi tanda salah tafsir. Auditor masa lalu mungkin memiliki pilihan untuk membedakan kemungkinan pemerasan oleh para eksekutif, baik secara

langsung atau dengan implikasi. Sebelum tanda-tanda kecurangan terbongkar, organisasi segera memimpin pertukaran auditor yang disengaja. Semakin tinggi pergantian auditor yang disengaja, semakin banyak rincian keuangan palsu. Hal ini karena evaluator baru sebenarnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menyelidiki organisasi sehingga mereka tidak dapat secara langsung mengidentifikasi dengan asumsi bahwa dewan mengirimkan pengungkapan keuangan palsu dan auditor belum terlalu mengenal dengan auditee. Dengan demikian pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat *auditor switching*. Adapun penelitian yang pernah menguji *auditor switching* terhadap kecurangan pelaporan keuangan antara lain Tarmizi (2018), Hasbi (2017), Rachmawati dan Marsono (2014), Utama dkk (2018), Rachmania Dkk (2017), yang menjelaskan hasil yaitu *auditor switching* berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Kedua, Penangguhan Tinjauan. Seperti yang dinyatakan oleh Wicaksono (2009), review delay adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh reviewer untuk membuat laporan review atas pelaksanaan moneter organisasi yang ditentukan dari perbedaan tanggal ringkasan anggaran organisasi sampai dengan tanggal dikeluarkannya anggaran. laporan review oleh KAP. Menurut Melati dan Sulistyawati (2016) Penundaan peninjauan dicirikan sebagai periode waktu antara akhir tahun anggaran organisasi dan tanggal laporan peninjauan yang diperkirakan dengan

menghitung jumlah hari. Menurut Aryati dan Theresia dalam Iskandar dan Trisnawati (2010:177) penundaan tinjauan adalah: "Periode waktu tinjauan ringkasan fiskal tahunan, diperkirakan dengan jumlah hari yang diharapkan untuk mendapatkan laporan evaluator otonom atas tinjauan laporan anggaran tahunan organisasi. , dari tanggal akhir tahun anggaran organisasi, khususnya 31 Desember sampai dengan tanggal yang dinyatakan di dalam laporan pemeriksa otonom yang dicirikan sebagai kendur laporan peninjauan". Sebagaimana dinyatakan oleh Widati dan Septy (2008:175) keterlambatan review adalah jangka waktu pemenuhan review yang diperkirakan dari tanggal akhir tahun anggaran sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan review. Berdasarkan pengertian di atas, maka cenderung beralasan bahwa review delay adalah waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan review dari akhir tahun buku organisasi sampai dengan tanggal laporan review diberikan. Kepraktisan akomodasi laporan keuangan yang dievaluasi sangat penting bagi organisasi yang telah terbuka dengan dunia, sehingga data dapat diakses dengan cepat sehingga cenderung digunakan dalam navigasi. Selain itu, penundaan deklarasi laporan anggaran kepada masyarakat umum karena penundaan review yang terlalu lama dapat mempengaruhi gambaran organisasi menurut para penyandang dana.

Hubungan *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai mediasi dalam pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan.



Dengan asumsi organisasi mengalami keterlambatan dalam mendistribusikan ringkasan anggaran yang disebabkan oleh penundaan peninjauan, organisasi akan lebih sering melakukan pertukaran evaluator di tahun berikutnya sehingga laporan fiskal tidak mengalami keterlambatan dalam distribusi dan memulihkan kepercayaan dari pendukung keuangan. Kehadiran pertukaran resensi yang disengaja bisa menjadi tanda salah tafsir. Peninjau masa lalu mungkin memiliki pilihan untuk membedakan gambaran keliru yang mungkin dilakukan oleh para eksekutif, baik secara langsung maupun dengan implikasi. Sebelum tanda-tanda pungli itu terbongkar, organisasi itu segera mengarahkan pertukaran pemeriksa yang disengaja. Semakin tinggi pertukaran pengawas yang disengaja, semakin banyak peningkatan pengungkapan moneter yang curang. Hal ini karena evaluator baru sebenarnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menyelidiki organisasi sehingga mereka tidak dapat langsung mengenali dengan asumsi bahwa para eksekutif menyerahkan pengungkapan uang palsu dan pengulas penasaran dengan auditee. Dengan demikian pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat *audit delay* dengan opsi *auditor switching* sebagai penguat peluang. Adapun penelitian yang pernah menguji *audit delay* terhadap *auditor switching* dan kecurangan pelaporan keuangan antara lain pawitri dan yadnyana (2015), Praptika dan Rasmini (2016), Ruroh dan Rahmawati (2016), Ardianingsih (2015), Robbitasari dan Wiratmaja (2013),

yang menunjukkan hasil yaitu audit *delay* berpengaruh terhadap auditor *switching*.

Ketiga, Kualitas audit. Sesuai Watkins et al (2004), kualitas tinjauan adalah kemungkinan bahwa inspektur akan menemukan dan melaporkan kesalahan kutipan material dalam ringkasan anggaran klien. Dilihat dari Pedoman Kecakapan Pembukuan Umum (SPAP), review yang dilakukan oleh pemeriksa seharusnya berkualitas baik, dengan asumsi memenuhi prasyarat atau pedoman evaluasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Randal J. Senior, Imprints. Beasley, dan Alvin A. Arens (2012: 105) kualitas ulasan adalah: "Kualitas ulasan berarti bagaimana menceritakan sebuah ulasan mengenali kesalahan materi laporan dalam ringkasan anggaran. Sudut pandang identifikasi adalah kesan kemampuan pemeriksa, sedangkan pengungkapan adalah kesan moral atau kejujuran inspektur, khususnya kebebasan." Seperti yang ditunjukkan oleh Rosnidah dalam Tarigan dan Susanti (2013) menggambarkan bahwa: "Quality review adalah pelaksanaan review yang dilengkapi dengan norma-norma sehingga evaluator dapat mengungkap dan melaporkan jika terjadi pelanggaran yang diajukan oleh klien, standar yang mengarahkan pelaksanaan review di Indonesia adalah Norma Ahli Pembukuan Publik." juga, sesuai Basuki (2006) dalam Bangun (2011) mengatakan: "Tinjauan kualitas adalah penilaian metodis dan otonom untuk memutuskan latihan, kualitas dan hasil sesuai pedoman yang telah diatur apakah tindakan dilakukan

benar-benar dan benar. sesuai dengan alasannya." Sesuai De Angelo (1981, 186) dalam W. Robert Kneche dan Gopal V. Krishnan et al (2013) arti kualitas ulasan adalah: "Kemungkinan bersama yang disurvei pasar bahwa pemeriksa tertentu akan menemukan celah dalam pembukuan klien kerangka kerja, dan laporan istirahat Mengingat lima definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas tinjauan adalah interaksi yang dimulai dari pengaturan sebelum menyelesaikan penilaian untuk menjamin bahwa pada umumnya norma-norma pemeriksaan yang diakui dilanjutkan dalam setiap tinjauan. , KAP mengikuti tinjauan strategi pengendalian kualitas yang membantu memenuhi aturan dasar, bidang prinsip kerja dan pedoman merinci dalam melakukan panggilan mereka.

Hubungan antara kualitas audit dan pertukaran auditor sebagai syafaat dalam mengungkapkan pengumuman uang palsu. Dengan asumsi KAP menunjukkan kualitas review yang rendah, maka organisasi akan melakukan pertukaran pemeriksa, organisasi melakukan pertukaran pemeriksa karena alasan peningkatan kualitas review. Ketika pemerintahan baru mengetahui bahwa kualitas review yang disampaikan oleh KAP sebelumnya rendah, hampir pasti, organisasi akan memikirkan kembali untuk melakukan pertukaran evaluator, yang belum jelas tentang sifat review yang dibuat secara langsung. Adanya pertukaran pemeriksa yang disengaja dapat menjadi tanda pemerasan. Peninjau sebelumnya mungkin memiliki opsi untuk

mengenalinya kemungkinan pemerasan oleh dewan, baik secara langsung atau tidak langsung. Sebelum tanda-tanda pemerasan terungkap, organisasi dengan cepat mengarahkan pertukaran pengulas yang disengaja. Semakin tinggi pertukaran inspektur yang disengaja, semakin banyak penambahan rincian keuangan palsu. Hal ini karena pengawas baru sebenarnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menyelidiki organisasi sehingga mereka tidak dapat dengan mudah membedakan dengan asumsi bahwa dewan mengirimkan pengumuman keuangan palsu dan pengulas ingin tahu tentang auditee. Oleh karena itu pengungkapan perincian uang palsu dapat dipengaruhi oleh tingkat kualitas ulasan dengan pilihan pertukaran pengulas sebagai pembicara pintu terbuka. Pemeriksaan yang telah menguji kualitas review pada pertukaran evaluator dan penipuan moneter termasuk Tarmizi (2018), Prasetyo (2014), Christiani dan Nugrahanti (2014), yang menunjukkan bahwa kualitas audit mempengaruhi pergantian auditor.

Keempat, *Leverage*. Menurut Agus Sartono (2008:257), pemikiran pengaruh adalah pemanfaatan sumber daya dan mata air aset oleh organisasi yang memiliki biaya tetap (biaya tetap) sepenuhnya bermaksud memperluas kemungkinan keuntungan investor. pengaruh adalah tingkat kemampuan organisasi untuk memanfaatkan cadangan (sumber daya) yang memiliki bobot yang tepat (kewajiban, penawaran unik) untuk memahami tujuan organisasi meningkatkan pemanfaatan kekayaan pemilik

organisasi. Secara keseluruhan, proporsi pengaruh adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kewajiban yang harus ditanggung organisasi untuk memenuhi sumber dayanya. Ada dua proporsi pengaruh yang biasa digunakan, yaitu kewajiban khusus untuk menambah sumber daya dan kewajiban untuk menambah nilai. Dalam tinjauan ini, pengaruh diproksikan dengan kewajiban terhadap proporsi nilai (DER). Sebagaimana ditunjukkan oleh Kasmir (2014:112), pengertian pengaruh adalah sebagai berikut: “Pengaruh menunjukkan sejauh mana sumber daya organisasi dibiayai oleh kewajiban”. Agus Harjito dan Martono (2011: 315) memberi pernyataan bahwa Pentingnya pengaruh adalah sebagai berikut: “Pengaruh dalam kehati-hatian pemasaran mengacu pada pemanfaatan sumber daya dan sumber aset (*wellsprings of assets*) oleh organisasi dimana dalam pemanfaatan sumber daya atau aset tersebut organisasi perlu membayar beban tetap atau tetap. “Seperti yang dikemukakan oleh Jogiyanto Hartono (2013: 282) pemikiran pengaruh adalah: “Pengaruh dicirikan sebagai keseluruhan nilai buku kewajiban jangka panjang yang dipisahkan oleh sumber daya mutlak. Sebagaimana ditunjukkan oleh Agus Sartono (2008:257), dalam administrasi moneter , pengaruh adalah pemanfaatan sumber daya dan mata air aset (*wellsprings of assets*) oleh organisasi yang memiliki biaya tetap yang sepenuhnya bertujuan untuk memperluas kemungkinan keuntungan investor, organisasi menggunakan pengaruh kerja

dan moneter. Kemudian lagi, pengaruh juga memperluas kemampuan perubahan (risiko) keuntungan, karena, seandainya organisasi mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada biaya yang layak, penggunaan pengaruh akan mengurangi keuntungan investor. Dari sebagian definisi di atas, cenderung beralasan bahwa pengaruh adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya organisasi dibiayai oleh kewajiban. Ini menyiratkan seberapa besar kesulitan kewajiban yang ditanggung oleh organisasi dibandingkan dengan sumber dayanya. Dari perspektif yang luas dijelaskan bahwa pengaruh digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi untuk membayar komitmennya secara keseluruhan.

Hubungan *leverage* dengan *auditor switching* sebagai mediasi dalam pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan. Apabila *Leverage* yang diprosikan dengan peningkatan kewajiban terhadap proporsi nilai (DER) dalam suatu organisasi, kemudian pada saat itu, organisasi mendanai kegiatannya dengan kewajiban daripada nilainya dan menunjukkan bahwa kewajiban membangun, semakin tinggi kewajiban organisasi, semakin tinggi bobot organisasi. membayar bunga dan kepala, dan perjudian kekecewaan. dalam membayar kewajiban akan tinggi. Hal ini dapat membuat organisasi mengalami tantangan keuangan, keadaan organisasi yang menghadapi kesulitan keuangan pada umumnya akan memperluas penilaian subjektivitas dan kewaspadaan reviewer, dalam kondisi seperti ini organisasi akan

cukup sering beralih KAP atau pertukaran pengawas. Pertukaran KAP atau pertukaran pemeriksa juga dapat disebabkan karena organisasi tidak dapat lagi membayar biaya pemeriksaan yang dibebankan oleh KAP karena penurunan batas keuangan organisasi. Selanjutnya, dalam keadaan kesulitan keuangan, organisasi terikat untuk melakukan pertukaran evaluator. Adanya pertukaran evaluator yang disengaja dapat menjadi tanda pemerasan. Peninjau sebelumnya mungkin memiliki opsi untuk mengenali kemungkinan pemerasan oleh dewan, baik secara langsung atau tidak langsung. Sebelum tanda-tanda pungli terbongkar, pihak rumah sakit segera mengarahkan pertukaran pemeriksa yang disengaja. Semakin tinggi pertukaran evaluator yang disengaja, semakin banyak peningkatan pengungkapan moneter palsu. Hal ini karena pemeriksa baru sebenarnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menyelidiki perusahaan sehingga mereka tidak dapat dengan mudah membedakan dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut mengirimkan pengumuman uang palsu dan pemeriksa ingin tahu tentang auditee. Dengan demikian pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat *leverage* dengan opsi *auditor switching* sebagai penguat peluang. Adapun penelitian yang pernah menguji *leverage* terhadap *auditor switching* antara lain Ibrahim dan Suryaningsih (2016), Kurniaty (2014), Mulyono dan Majidah (2015), Luypaert et al (2012), menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh yesriani dan rahayu (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian yesriani dan rahayu (2016) yaitu, Data yang digunakan dalam penelitian saya merupakan data tahun terbaru dari tahun 2018-2020. Pada penelitian sebelumnya menggunakan populasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi perusahaan yang bergerak di bidang *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alasan Peneliti menjadikan objek penelitian tersebut dikarenakan beberapa alasan berikut : (1) Jumlah perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup banyak. (2) Perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan di BEI memiliki kontribusi cukup besar dalam aktivitas investasi, dimana investor masih tertarik untuk melakukan investasi di sektor ini walaupun indeks sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan terus menurun. (3) Ingin menguji bagaimana perkembangan pengungkapan pendektesian kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Delay*, *Kualitas Audit* dan *Leverage* Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan : *Auditor Switching* Sebagai Variabel *Intervening* Studi Pada Perusahaan *Property, Real Estate* dan Kontruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018-2020”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah mengenai :

1. Terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang telah melakukan GCG namun masih saja terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan.
2. Ada beberapa organisasi yang mengarahkan pertukaran pemeriksa di luar pengaturan yang relevan. Pertukaran pemeriksa yang dilakukan oleh organisasi dengan sengaja masih menimbulkan masalah bagi penyandang dana terkait dengan alasan di balik organisasi melakukan pertukaran evaluator.
3. Adanya perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit

menyebabkan timbulnya asumsi investor bahwa perusahaan sedang dalam kondisi tidak baik.

4. Kualitas audit yang berorientasi dengan KAP nonreputasi menyebabkan adanya asumsi investor bahwa laporan keuangan perusahaan yang disajikan dalam kondisi tidak dengan realitanya.
5. *Leverage* yang berada dalam kondisi rendah, menimbulkan persepsi para investor bahwa perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan dan beranggapan perusahaan akan melanggar kredit atau memanajemen laba.

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, kapasitas dan informasi tentang penulis, sejauh mungkin masalah dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan 3 variabel independen yaitu, *audit delay*, kualitas audit dan *leverage*. Variabel dependen masalah yang dibatasi adalah kecurangan pelaporan keuangan dan *auditor switching* (pergantian auditor) sebagai variabel *intervening*. Peneliti juga membatasi tempat penelitian yaitu perusahaan sektor *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan dan waktu penelitian dari tahun 2018-2020.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* diperusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *auditor switching* secara diperusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *auditor switching* diperusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ?
4. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan diperusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ?
5. Apakah *auditor switching* memediasi hubungan antara *audit delay*, kualitas audit dan *leverage* dengan kecurangan pelaporan keuangan diperusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* diperusahaan sektor *property, real estate* dan kontruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *auditor switching* diperusahaan sektor *property, real estate* dan kontruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *auditor switching* diperusahaan sektor *property, real estate* dan kontruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.
4. Untuk mengetahui *auditor switching* pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan diperusahaan sektor *property, real estate* dan kontruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* memediasi hubungan antara *audit delay*, kualitas audit dan *leverage* terhadap kecurangan pelaporan keuangan diperusahaan sektor *property, real estate* dan kontruksi bangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### A. Bagi investor

Dapat memberikan informasi mengenai alasan perusahaan melakukan *auditor switching* secara sukarela, padahal sudah ada peraturan mengenai pergantian auditor, dan mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

### B. Untuk Esais

Dapat memperoleh informasi dan pemahaman lebih lanjut tentang pengumuman uang palsu, terutama yang berkaitan dengan dampak penundaan pemeriksaan, kualitas pemeriksaan dan pengaruh terhadap rincian uang palsu dengan pertukaran pemeriksa sebagai mediasi.

### C. Untuk pertemuan yang berbeda

Dengan pemeriksaan ini diyakini cenderung dapat dimanfaatkan sebagai bahan info dan korelasi yang dapat menambah pemahaman dan informasi, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk eksplorasi tambahan.